

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan perekonomian masyarakat dilakukan oleh semua pihak, mulai dari pemerintahan pusat sampai dengan pemerintahan terendah yaitu desa, pemerintah pusat dibantu oleh pemerintah desa untuk secara langsung berinteraksi dengan masyarakat. Menurut Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014: Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Desa berkewajiban untuk melakukan pembangunan sumber daya manusia maupun pembangunan fisik serta berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa (Sirait, 2021)

Desa dapat mendirikan BUMDes dengan mempertimbangkan beberapa faktor yakni : 1) inisiatif pemerintah desa dan/atau masyarakat desa; 2) potensi usaha ekonomi desa; 3) sumberdaya alam di desa; 4) sumberdaya manusia yang mampu mengelola BUMDes; 5) penyertaan modal dari pemerintah desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUMDes (Permendesa No. 4 Tahun 2015). Dari hasil beberapa survei BUMDes berbentuk usaha penyewaan lahan tanah, penggemukan sapi, tanam jahe merah, koperasi, sembako dan lain sebagainya (Kusrini, 2020)

Badan Usaha Milik Desa selanjut nya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa (Pasal 1, Permendesa no.4 Tahun 2015). BUM desa merupakan Lembaga Usaha Desa dimana diharapkan dapat menciptakan kegiatan usaha bisnis yang dapat dikelola masyarakat dan Pemerintah Desa.

Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) sudah ada sejak tahun 2004, namun peraturan perundangan yang membahas lebih rinci tentang BUM Desa baru tersedia pada tahun 2014. Walaupun BUM Desa sudah ada sejak lama, akan tetapi perkembangannya masih jauh dari harapan terutama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui unit- unit usaha yang dibangunnya. Terdapat ribuan desa yang masih belum membentuk/mendirikan lembaga ini. Beberapa permasalahan yang secara umum dihadapi oleh BUM Desa, diantaranya adalah kecilnya skala ekonomi serta terbatasnya akses pasar, kompleksitas tata aturan dan kelembagaan, dukungan Pemdes yang belum optimal, sinergi antara masyarakat dan kelompok, kurangnya kemampuan teknis operasional, terbatasnya akses permodalan, rendahnya kompetensi dan komitmen SDM, sistem manajemen yang belum tertata, akuntabilitas publik dan pertanggung jawaban, resiko dampak lingkungan. Permasalahan diatas menjadi masalah pokok yang dapat menghambat berkembangnya BUM Desa.

Salah satu bentuk terlaksananya BUM Desa yang baik dapat dilihat dari penerapan prinsip akuntansi yang tepat dan benar. BUM Desa merupakan suatu

lembaga yang didasari oleh landasan hukum. Oleh karena itu, penerapan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan harus berlandaskan standar keuangan, sehingga menjadi acuan yang kuat dalam kepercayaan dan keterbukaan atas keuangan yang dikelola BUM Desa dari semua pihak (Rudini, 2016)

BUM Desa harus membuat laporan keuangan yang akuntabel dan transparan serta mudah dipahami, karena laporan keuangan tersebut akan dipertanggungjawabkan ke berbagai pihak termasuk pemerintahan. BUM Desa harus membuat laporan keuangan dengan wajar karena merupakan institusi usaha yang menggunakan dana pemerintah dan masyarakat sebagai modal usahanya. Laporan keuangan yang berpedoman kepada standar akuntansi keuangan dan peraturan yang berlaku inilah yang menjadi tolok ukur bagi pihak yang menjadi pengawas BUM Desa tersebut. Pelaporan keuangan yang tidak jelas dan tidak sesuai dapat berisiko karena dianggap sebagai bentuk penyelewengan atau penyalahgunaan wewenang yang berakibat pada masalah hukum yang nantinya harus dipertanggungjawabkan (R. A. Saputra, 2019)

Secara umum, prinsip pembukuan keuangan BUM Desa tidak berbeda dengan pembukuan keuangan lembaga lain pada umumnya. BUMDes harus melakukan pencatatan atau pembukuan yang ditulis secara sistematis dari transaksi yang terjadi setiap hari. Pencatatan transaksi itu umumnya menggunakan sistem akuntansi. Fungsi dari akuntansi adalah untuk menyajikan informasi keuangan kepada pihak internal dan eksternal dan sebagai dasar membuat keputusan. Pihak internal BUM Desa adalah pengelola, sedangkan pihak eksternal adalah pemerintah

kabupaten, perbankan dan masyarakat yang memberikan penyertaan modal, serta petugas pajak.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Perubahan Badan Usaha Milik Desa pada Bab III pasal 12 ayat 3 menyatakan bahwa pelaksana operasional (direktur) berwenang membuat laporan keuangan seluruh unit usaha BUM Desa setiap bulan. Tentu saja hal ini harus berpedoman pada standar keuangan yang berlaku umum. BUM Desa dalam melaksanakan penyusunan laporan keuangan harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh standar keuangan yang digunakan. Artinya dalam hal penyusunan laporan keuangannya maka BUM Desa harus mengacu pada pedoman umum yaitu Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik atau sering juga disebut dengan istilah SAK ETAP. Dalam SAK ETAP (2016) pada bab 3 tentang penyajian laporan keuangan dinyatakan bahwa laporan keuangan lengkap suatu entitas terdiri dari: Laporan Posisi keuangan, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Ini artinya bahwa BUM Desa harus menyusun laporan keuangan secara lengkap sesuai dengan pedoman SAK ETAP. (Ikatan Akuntan Indonesia, 2016)

SAK ETAP merupakan Pilar kedua standar akuntansi keuangan di Indonesia setelah standar akuntansi keuangan (SAK) umum berbasis Financial Reporting Standards (IFRS) yaitu Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). SAK ETAP diperuntukkan bagi entitas tanpa akuntabilitas publik artinya perusahaan yang belum go-public. SAK ETAP

mengatur pencatatan akuntansi yang lebih sederhana dibandingkan SAK umum dalam hal pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan transaksi pada laporan keuangan. SAK ETAP ini berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2011. (Ikatan Akuntan Indonesia, 2016)

Salah satu BUM Desa yang bernama Raja Mandiri Raja merupakan BUM Desa yang berada di Desa Raja, Kecamatan Bua Kabupaten Luwu. Berdiri pada tahun 2015. Raja Mandiri Raja merupakan lembaga ekonomi yang mulanya berawal dari Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) bergerak di bidang simpan pinjam dan merupakan milik masyarakat desa yang diusahakan serta dikelola oleh masyarakat desa.

Penerapan akuntansi dalam penyajian laporan keuangan merupakan hal yang harus dimiliki jika BUM Desa Raja Mandiri Raja ingin terus mengembangkan usahanya. Karena dengan adanya laporan keuangan berguna untuk menggambarkan kondisi keuangan dan dan hasil usaha BUM Desa Raja Mandiri Raja pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu. Penerapan SAK ETAP dalam penyusunan laporan keuangan yang dibuat oleh BUM Desa Raja Mandiri Raja dapat memudahkan dalam penyajian laporan keuangan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) Terhadap Penyajian Laporan Keuangan BUM Desa (Studi Pada Desa Raja)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana penyajian laporan keuangan dengan prinsip SAK ETAP di BUM Desa Raja Mandiri Raja ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk untuk menggali makna dan menginterpretasi laporan keuangan BUM Desa Raja Mandiri Raja dengan menggunakan prinsip SAK ETAP.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memberikan manfaat kepada berbagai pihak. Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi penulis

Merupakan persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Akuntansi di Universitas Muhammadiyah Palopo sekaligus menambah wawasan dan pemahaman di bidang akuntansi tentang bagaimana menganalisis laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), dan juga sebagai bahan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

2. Bagi Desa Raja

Sebagai informasi tambahan dalam melakukan pengendalian terhadap kemungkinan penyalahgunaan kekayaan desa dan sebagai bahan pertimbangan dalam penyajian laporan keuangan guna sebagai bahan dalam pengambilan keputusan.

3. Bagi pembaca

Memberikan masukan-masukan ilmu pengetahuan sistem akuntansi keuangan daerah khususnya mahasiswa dan sebagai bahan perbandingan bagi mahasiswa lain yang mengadakan penelitian dalam bidang yang sama.

1.5 Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

Batasan Permasalahan ini bertujuan untuk membatasi pembahasan pada pokok permasalahan penelitian saja. Ruang lingkup menentukan konsep utama dari permasalahan sehingga masalah-masalah dalam penelitian dapat dimengerti dengan mudah dan baik. Batasan masalah penelitian sangat penting dalam mendekati pada pokok permasalahan yang akan dibahas.

Ruang lingkup penelitian dimaksud sebagai penegasan mengenai batasan-batasan objek. Ruang lingkup dalam penelitian ini yaitu Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) Terhadap Penyajian Laporan Keuangan BUM Desa (Studi Pada Desa Raja) melalui hasil wawancara secara mendalam.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Laporan Keuangan

2.1.1.1 Pengertian Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan suatu informasi yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan dan lebih jauh informasi tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan perusahaan tersebut (Fahmi, 2014). Menurut pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) Nomor 1 laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas.

Menurut Hery (2018) laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan atau aktivitas perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan kata lain, laporan keuangan ini berfungsi sebagai alat informasi yang menghubungkan perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan, yang menunjukkan kondisi kesehatan keuangan perusahaan dan kinerja perusahaan. Adapun jenis laporan keuangan yang lazim dikenal adalah Laporan posisi keuangan, laporan laba-rugi atau hasil usaha, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan.

2.1.1.2 Tujuan Laporan Keuangan

Menurut Standar Akuntansi Keuangan yang dikeluarkan oleh IAI “tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi posisi keuangan, kinerja keuangan, serta laporan arus kas suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Laporan keuangan yang disusun untuk tujuan ini

memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pemakai. Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen, atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya”.

Para pemakai laporan akan menggunakannya untuk meramalkan membandingkan, dan menilai dampak keuangan yang timbul dari keputusan ekonomis yang diambilnya. Informasi mengenai dampak keuangan yang timbul sangat berguna bagi pemakai untuk meramalkan, membandingkan dan menilai keuangan. Beberapa tujuan laporan keuangan dari berbagai sumber di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Informasi posisi laporan keuangan yang dihasilkan dari kinerja dan aset perusahaan sangat dibutuhkan oleh para pemakai laporan keuangan, sebagai bahan evaluasi dan perbandingan untuk melihat dampak keuangan yang timbul dari keputusan ekonomis yang diambilnya.
- 2) Informasi keuangan perusahaan diperlukan juga untuk menilai dan meramalkan apakah perusahaan di masa sekarang dan di masa yang akan datang akan menghasilkan keuntungan yang sama atau lebih menguntungkan
- 3) Informasi perubahan posisi keuangan perusahaan bermanfaat untuk menilai aktivitas investasi, pendanaan dan operasi perusahaan selama periode tertentu. Selain untuk menilai kemampuan perusahaan, laporan keuangan juga bertujuan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi

2.1.1.3 Jenis-Jenis Laporan Keuangan

Menurut SAK ETAP (2016) laporan keuangan entitas meliputi :

- a) Laporan Posisi Keuangan
- b) Laporan Laba Rugi
- c) Laporan Perubahan Ekuitas
- d) Laporan Arus Kas,dan
- e) Catatan atas Laporan Keuangan (Ikatan Akuntan Indonesia, 2016)

2.1.2 Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP)

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2016) dalam SAK ETAP, Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dimaksudkan untuk digunakan oleh Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP), yaitu entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial statement) bagi pengguna eksternal. Contoh pengguna eksternal adalah pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur, dan peneringkat kredit. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik atau SAK ETAP ialah sebuah standar yang dibuat di dalam bidang akuntansi keuangan yang dimana ditujukan kepada Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (Ikatan Akuntan Indonesia, 2016)

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2016), SAK ETAP bertujuan untuk menciptakan fleksibilitas dalam penerapannya dan diharapkan memberi kemudahan akses ETAP kepada pendanaan dari perbankan. SAK ETAP merupakan SAK yang berdiri sendiri dan tidak mengacu pada SAK umum, sebagian besar

menggunakan konsep biaya historis, mengatur transaksi yang dilakukan oleh ETAP, bentuk pengaturan yang lebih sederhana dalam hal perlakuan akuntansi dan relatif tidak berubah selama beberapa tahun (Ikatan Akuntan Indonesia, 2016)

Penerapan ini diperkenankan. SAK yang berbasis IFRS (SAK Umum) ditujukan bagi entitas yang mempunyai tanggung jawab publik signifikan dan entitas yang banyak melakukan kegiatan lintas negara. SAK umum tersebut rumit untuk dipahami serta diterapkan bagi sebagian besar entitas usaha di Indonesia yang berskala kecil dan menengah. Dalam beberapa hal SAK ETAP memberikan banyak kemudahan untuk suatu entitas dibandingkan dengan SAK Umum dengan ketentuan pelaporan yang lebih kompleks. Sesuai dengan ruang lingkup SAK ETAP, maka standar ini dimaksudkan untuk digunakan oleh entitas tanpa akuntabilitas publik. Entitas tanpa akuntabilitas publik yang dimaksud adalah entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal. Contoh pengguna eksternal adalah pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelola usaha, kreditur, dan lembaga pemeringkat kredit. Namun, entitas yang mempunyai tanggung jawab publik signifikan dapat juga menggunakan SAK ETAP apabila diizinkan oleh regulator.

2.1.3 Badan Usaha Milik Desa

2.1.3.1. Pengertian Badan Usaha Milik Desa

Menurut Permendes No. 4 Tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Badan Usaha Milik Desa selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian

besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Desa dapat mendirikan BUMDes dengan mempertimbangkan :

- a. Inisiatif pemerintah desa dan/atau masyarakat desa
- b. Potensi usaha ekonomi desa
- c. Sumber daya alam di desa
- d. Sumber daya manusia yang mampu mengelola BUMDes
- e. Penyertaan modal dari pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUMDes

2.1.3.2 . Tujuan Badan Usaha Milik Desa

Menurut Permendesa No. 4 Tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa, pendirian BUMDes dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh desa dan/atau kerja sama antar desa.

Pendirian BUMDes bertujuan :

- a. Meningkatkan perekonomian desa
- b. Mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa
- c. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa
- d. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga
- e. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga

- f. Membuka lapangan kerja
- g. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa
- h. Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya di samping itu kajian terdahulu membantu penelitian dapat memposisikan penelitian serta menunjukkan orsinalitas dari penelitian

Tabel 2.1 : Penelitian Terdahulu

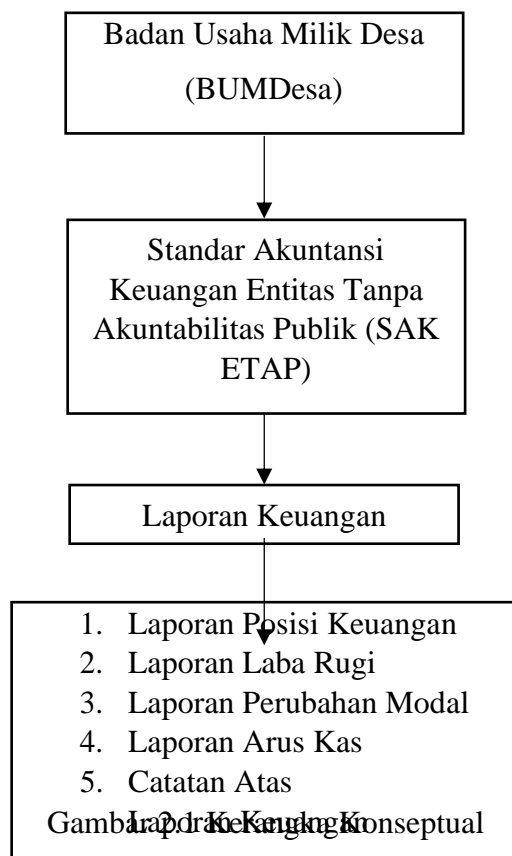
No	Nama Judul Dan Tahun Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Devinta Indah Sari Sinaga (2022), Analisis Penerapan Sak Etap Pada Badan Usaha Milik Desa Yang Ada Di Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan (Indah Sari Sinaga, 2022)	Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan BUMDesa di Kecamatan Pulo Bandring sudah membuat laporan keuangan pada usahanya tetapi belum menerapkan SAK ETAP. BUM Desa Mandiri membuat laporan berupa Laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan laporan perubahan ekuitas.
2	Dian Saputra (2021), Analisis Penerapan Akuntansi	Penelitian ini menggunakan metode deskriptif	Hasil Penelitian dapat disimpulkan bahwa BUMDes X Kecamatan Kelayang

	Pada Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) X Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu (D. Saputra, 2021)	menelaah dan membandingkan antara data yang telah dikumpulkan dengan teori-teori yang berkaitan dan disajikan dalam bentuk penelitian tersebut.	Kabupate Indragiri Hulu belum sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum.
3	Riki Gunanda (2020) Analisis penerapan standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik (sak etap) pada laporan keuangan badan usaha milik desa (bumdes) al-kautsar desa kampung baru sentajo periode 2014-2018 (Gunanda, 2020)	Metode dan teknik pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dan wawancara, dokumentasi dan studi pustaka yang berhubungan dengan laporan keuangan berbasis SAK ETAP.	Hasil penelitian yang dilakukan pada BUMDES Al-Kautsar adalah terdapat beberapa masalah diantaranya yaitu; laporan keuangan yang disajikan oleh BUMDES Al kautsar tidak lengkap berdasarkan PSAK ETAP, kemudian adanya jumlah inventaris asset yang tidak sesuai dengan pencatatan, serta BUMDES Al-Kautsar tidak mencantumkan Pembayaran pajak mereka
4	Atika Wahyuningtias (2021), Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan Sak Etap Pada Bumdes	Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan analisis	Hasil penelitian menunjukkan bahwa BUMDes Rejo Makmur hanya membuat Laporan posisi keuangan, dan laporan laba. Selain itu, dalam penyusunan laporan keuangan

	Rejo Makmur Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi (Wahyuningtias, 2021)	data dengan proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data	BUMDes Rejo Makmur dasar pengakuan dan perhitungan tidak sesuai dengan nilai wajarnya serta nilai nominal tidak sesuai dengan nilai transaksi riil,
5	I Gusti Ayu Astri Pramitari (2020), Penerapan Sak Etap Pada Unit Jasa Pengelolaan Sampah Bumdes Desa Buduk(Pramitari, 2020)	Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui survey lapangan yakni dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi.	Hasil penelitian ini menunjukkan laporan pertanggungjawaban yang disusun belum sesuai dengan SAK ETAP sehingga dirancang suatu model pertanggungjawaban yang sesuai dengan SAK ETAP guna memberikan informasi yang lebih komperhensif kepada pengguna

2.3 Kerangka Konseptual

Berdasarkan kerangka teori dibawah ini dalam menjalankan usaha mestinya BUMDesa melakukan pencatatan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik yaitu yang terdiri dari: Laporan posisi keuangan, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Modal, Laporan Arus Kas, Catatan Atas Laporan Keuangan. Pada penelitian ini peneliti akan membandingkan laporan keuangan yang telah disusun oleh BUMDesa untuk dapat dilihat kesesuaiannya dengan SAK ETAP



Gambar 2.3 Kerangka Konseptual

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan fenomenologi. Fenomenologi merupakan bagian dari metode kualitatif yang berhubungan dengan pemahaman tentang kehidupan keseharian dan dunia kehidupan partisipan. Pendekatan fenomenologi mencoba untuk menjelaskan atau mengungkapkan makna konsep atau fenomena pengalaman yang didasari oleh kesadaran yang terjadi pada beberapa individu. Fenomenologi dilakukan dalam memaknai atau memahami fenomenologi dilakukan dalam situasi yang alami, sehingga tidak ada batasan dalam memaknai atau memahami fenomenologi yang dikaji dan penelitian bebas untuk menganalisis data yang diperoleh.

Penelitian ini disebut penelitian kualitatif karena merupakan penelitian yang tidak mengadakan perhitungan. Penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi dipilih karena belum banyak yang menggunakan pendekatan ini terlebih dengan tema atau masalah yang diteliti. Selain hal itu, fenomenologi juga menjelaskan sifat fenomena, sehingga mampu memberikan gambaran mengenai sesuatu yang apa adanya dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

3.2 Kehadiran Peneliti

Peneliti sebagai orang yang melakukan observasi mengamati dengan cermat terhadap obyek penelitian. Untuk memperoleh data tentang penelitian ini, maka peneliti terjun langsung kelapangan. Kehadiran peneliti dalam penelitian ini

berperan sebagai instrumen kunci yang berperan sebagai pengamat non partisipan, di mana peneliti turun lapangan tidak melibatkan diri secara langsung dalam kehidupan obyek penelitian. Sesuai dengan ciri pendekatan kualitatif salah satunya sebagai instrument kunci. Dengan itu peneliti di lapangan sangat mutlak hadir atau terjun langsung dalam melakukan penelitian. Berkenaan dengan hal tersebut, dalam mengumpulkan data peneliti berusaha menciptakan hubungan yang baik dengan informan yang menjadi sumber data agar data-data yang diperoleh betul-betul valid. Dalam pelaksanaan penelitian ini peneliti akan hadir di lapangan sejak diizinkan melakukan penelitian, yaitu dengan cara mendatangi lokasi penelitian pada waktu-waktu tertentu, baik terjadwal maupun tidak terjadwal.

3.3 Tempat dan Waktu Penelitian

Dalam rangka pengumpulan data dan informasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, maka lokasi penelitian secara langsung dilakukan pada Badan Usaha Milik Desa Raja yaitu BUM Desa Raja Mandiri Raja yang ada di Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April 2021 sampai dengan Juni 2021.

3.4 Jenis Dan Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis dan sumber data sebagai berikut:

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif. Data kualitatif merupakan data yang didapatkan melalui analisis yang dilakukan dengan wawancara secara langsung untuk memperoleh data dan menjawab rumusan masalah mengenai penerapan SAK ETAP pada Badan Usaha Milik Desa.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau pihak pertama. Di dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui wawancara langsung kepada Pengelola BUMDesa yaitu pihak-pihak yang berkaitan dalam penyusunan Laporan Keuangan BUMDesa.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data ini diperoleh dari artikel, publikasi-publikasi di internet, buku literatur dan tulisan- tulisan yang dapat digunakan sebagaacuan yang bisa mendukung penelitian ini. Data yang diperoleh dalam penelitian ini berupa teori, kajian literatur, dan penelitian terdahulu.

3.5 Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah narasumber atau informan yang menjadi sumber data dalam penelitian. Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah Badan Usaha Milik Desa termasuk pengelola BUMDesa yaitu Ketua/Sekretaris/Bendahara sebagai sumber untuk dapat memberikan informasi yang dibutuhkan peneliti.

Tabel 3.1 Daftar Nama-Nama Informan

No.	Nama	Jabatan
1	ABD.MALIK	Ketua
2	NURPADILLA,S.Pd	Sekretaris
2	JUMRIAH	Bendahara

2. Objek Penelitian

Objek Penelitian adalah topik yang menjadi permasalahan dalam penelitian.

Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi yang dimaksud yaitu penulis akan turun observasi langsung dengan cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat untuk keperluan tersebut. Observasi ini digunakan untuk penelitian yang telah direncanakan secara sistematis tentang Bagaimana Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) terhadap penyajian laporan keuangan BUM Desa Raja Mandiri Raja yang berada di Desa Raja, Kecamatan Bua Kabupaten Luwu.

2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengambilan data dimana peneliti langsung berdialog dengan responden untuk menggali informasi dari responden. Wawancara dilakukan kepada Pengelola Badan Usaha Milik Desa.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode yang digunakan untuk menelusuri data historis. Peneliti memperoleh data yang berasal dari artikel dan jurnal terdahulu sebagai pendukung penelitian. Peneliti juga menggunakan dokumen berupa catatan dan laporan keuangan milik Badan Usaha Milik Desa yang akan dianalisis kesesuaiannya dengan SAK ETAP.

3.7 Teknik Keabsahan Data

Dalam pengecekan data peneliti menggunakan teknik pemeriksaan keabsahan data yaitu triangulasi. Menurut Moleong (2010) triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Peneliti menggunakan teknik ini untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan konstruksi kenyataan yang ada dalam konteks suatu studi sewaktu mengumpulkan data tentang berbagai kejadian dan hubungan dari berbagai pandangan. Dengan kata lain, peneliti dapat merecheck temuannya dengan jalan membandingkannya dengan berbagai sumber, metode, atau teori. Langkah yang digunakan dalam teknik triangulasi data ini adalah dengan menggunakan sumber dan metode. Patton (dalam Lexy J. Moleong, 2010) mengatakan bahwa “triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda. Dengan menggunakan teknik ini peneliti dapat membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi,

membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu, membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang berada, orang pemerintahan, dan membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan”. Sedangkan menurut Patton (dalam Lexi J. Moleong, 2010:331) mengemukakan “triangulasi dengan metode terdapat dua strategi, yaitu pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data dan pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama”.

3.8 Teknik Analisis Data

Umumnya, penulis kualitatif menggunakan prosedur yang umum dan langkah-langkah khusus dalam analisis data. Lebih lanjut Analisis data pada penelitian fenomenologi oleh cresswel (1996) dibagi dalam beberapa langkah penelitian antara lain:

1. Peneliti memulai mengorganisasikan semua data atau gambaran menyeluruh tentang fenomena pengalaman yang telah dikumpulkan
2. Membaca data secara keseluruhan dan membuat catatan pinggir mengenai data yang dianggap penting kemudian melakukan pengkodean data
3. Menemukan dan mengelompokkan makna pernyataan yang dirasakan oleh responden dengan melakukan horizationaliting yaitu setiap pernyataan pada awalnya diperlakukan memiliki nilai yang sama. Selanjutnya, pernyataan yang tidak relevan dengan topik dan pertanyaan maupun pernyataan yang bersifat repetitif atau tumpang tindih dihilangkan, sehingga yang tersisa hanya horizons

(arti tekstural dan unsur pembentuk atau penyusun dari phenomenon yang tidak mengalami penyimpangan)

4. Pernyataan tersebut kemudian di kumpulkan ke dalam unit makna lalu ditulis gambaran tentang bagaimana pengalaman tersebut terjadi
5. Selanjutnya peneliti mengembangkan uraian secara keseluruhan dari fenomena tersebut sehingga menemukan esensi dari fenomena tersebut. Kemudian mengembangkan textural description (mengenai fenomena yang terjadi pada responden) dan structural description (yang menjelaskan bagaimana fenomena itu terjadi)
6. Peneliti kemudian memberikan penjelasan secara naratif mengenai esensi dari fenomena yang diteliti dan mendapatkan makna pengalaman responden mengenai fenomena tersebut
7. Membuat laporan pengalaman setiap partisipan. Setelah itu, gabungan dari gambaran tersebut ditulis.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Obyek Penelitian



Gambar 4.1 Obyek Penelitian

BUMDes Raja Mandiri Raja merupakan salah satu BUMDes yang terdapat di Kabupaten Luwu. BUMDes Raja Mandiri Raja berlokasi di Desa Raja , Kecamatan Bua Kabupaten Luwu. BUMDes Raja Mandiri Raja didirikan pada tanggal 02 Januari 2015. Dengan berdirinya BUMDes Raja Mandiri Raja tersebut kedepannya diharapkan mampu memanfaatkan potensi dan aset desa untuk membangun kesejahteraan warga Desa Raja, karena bukan lagi program *topdown* atau paket program dari pemerintah daerah atau pusat, melainkan pembangunan desa yang digerakkan oleh kekuatan warga.

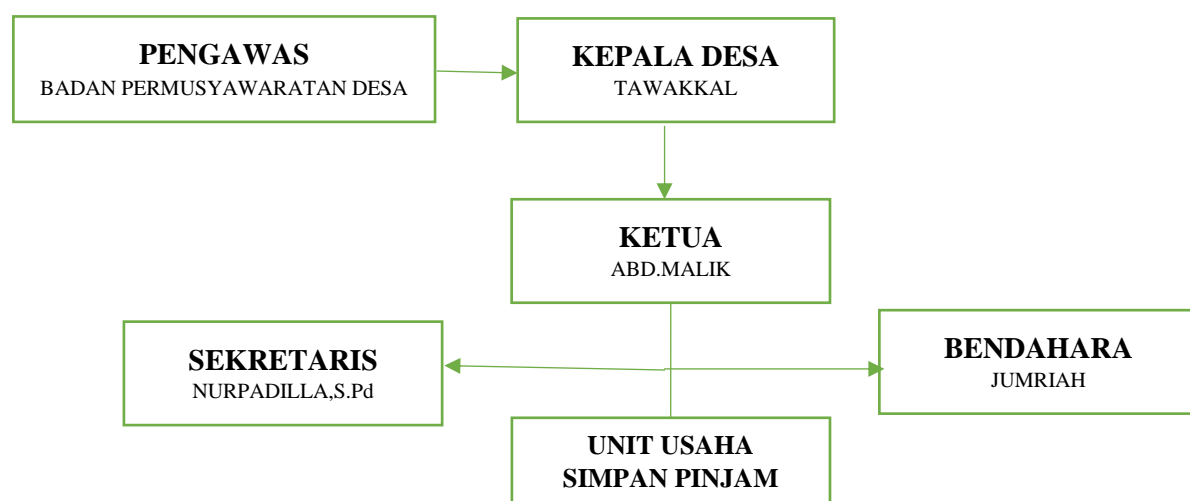
Pada awal pendirian BUMDes Raja Mandiri Raja bermodalkan nol rupiah atau modal dengkul. Walaupun demikian bukan berarti BUMDes ini tidak subur atau tidak berkembang, melainkan mampu berkembang dengan pesat. BUMDes

Raja Mandiri Raja mulai beroperasi sejak tahun 2015 dengan memanfaatkan penyertaan modal awal Desa sebesar Rp. 20.000.000. Pada bulan Desember tahun 2016 sebesar Rp. 20.000.000. Desember tahun 2017 sebesar Rp. 50.000.000. Desember tahun 2018 sebesar Rp. 50.000.000. Desember tahun 2019 sebesar Rp. 40.000.000. Desember tahun 2020 sebesar Rp. 40.000.000. Desember tahun 2021 sebesar Rp. 25.000.000 Dari anggaran Dana Desa. Modal penyertaan ini sebagai aset desa yang terpisahkan dalam BUMDes. Pada tahun 2016 BUMDes Raja Mandiri Raja menggunakan modal tersebut sebagai usaha kredit pinjaman kepada masyarakat.

Kantor khusus BUMDes Raja Mandiri Raja sendiri selama ini masih memanfaatkan salah satu ruangan di Kantor Desa yang didalamnya tergabung beberapa meja kerja perangkat kerja desa karena belum tersedianya kantor khusus untuk menjalankan kegiatan usaha BUMDes Raja Mandiri Raja.

4.2 Struktur Organisasi BUMDes Raja Mandiri Raja

Adapun struktur organisasi yang terdapat pada BUMDes Raja Mandiri yaitu sebagai berikut:



Gambar 4.2 Struktur Organisasi BUMDes Raja Mandiri Raja

4.3 Visi dan Misi BUMDes Raja Mandiri Raja

A. Visi BUMDes Raja Mandiri Raja

Visi dari pendirian BUMDesa Raja Mandiri Raja yaitu : " Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Raja Melalui Pengembangan Usaha Ekonomi dan Pelayanan Sosial dengan Motto MARI BERSAMA MEMBANGUN DESA " .

B. Misi BUMDes Raja Mandiri Raja

BUMDes Raja Mandiri Raja memiliki fungsi sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan BUMDes sebagai lokomotif kegiatan perekonomian dan pemberdayaan masyarakat desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Raja dalam mewujudkan kemandirian dalam bidang .
- 2) Meningkatkan pendapatan hasil desa (PADESa) Raja untuk meningkatkan pengembangan dan peningkatan pelayanan masyarakat desa Raja .
- 3) Menggali dan memberdayakan potensi desa untuk didayagunakan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat .
- 4) Memperkuat kelembagaan dan memperluas jaringan kerja baik secara internal maupun eksternal desa dengan berbagai potensi masyarakat dan berbagai pihak serta bersinergi dengan lembaga - lembaga guna memperkokoh desa Raja .

4.4 Analisis Hasil Wawancara

4.4.1 Analisis Ketidaksesuaian Laporan Keuangan BUMDes Raja Mandiri Raja Sesuai SAK-ETAP

Untuk mengetahui apa saja unsur yang tidak sesuai pada laporan keuangan yang telah dibuat oleh BUMDes Raja Mandiri Raja , maka dilakukan kegiatan observasi,wawancara, dan dokumentasi.

1. Laporan Posisi Keuangan

Dari proses tersebut ditemukan bahwa Laporan posisi keuangan yang dibuat oleh BUMDes Raja Mandiri Raja telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntansi Publik (SAK ETAP). Berikut ini adalah gambar dari necara laporan keuangan BUMDes Raja Mandiri Raja tahun 2021.

NERACA AKHIR BUMDES RAJA MANDIRI RAJA DESA RAJA KEC. BUA KAB LUWU PER 31 DESEMBER 2021						
AKTIVA			PASSIVA			
1.	Harta			2.	Hutang	Rp
1.1	Kas					Rp
1.1.1	Kas Bumdes	Rp 32.760.000		2.1	Pendidikan, Pembinaan, dan Pelatihan	Rp
1.1.2	Kas Operasional Bumdes					Rp
	Total Kas		Rp 32.760.000	2.2	Dana Sosial	
1.2	Bank			2.3		
1.2.1	Bank Bumdes Raja Mandiri Raja	Rp 25.017.000		2.4	Bonus Pembangun an Desa	
1.2.2	Bank Operasional Bumdes					Rp 240.000.000
	Total Bank		Rp 25.017.000	3.	Modal	
1.3	Piutang/Pinjaman	Rp 250.098.000		3.1	Modal Alokasi Bumdes	
1.3.1	Pinjaman Berpulir			3.2	Penambahan Modal Dial 5111	Rp 2.217.000, Rp 8.794.000,
	Total Pinjaman		Rp 250.098.000			
1.4	Biaya Dibayar Dimasa Ak. Amortisasi					Tahun 2017 Tahun 2018 Rp 10.676.000, Rp 18.068.000,
	Total Nilai Buku			3.3	Surplus/Defi sif Ditahan	
1.5	Invantaris	Rp 10.000.000				Tahun 2019 Tahun 2020 Rp 10.676.000, Rp 18.068.000,
1.5.1	Ak. Penyusutan Total Nilai Buku Invantaris		Rp 10.000.000	3.4	Surplus/Defi sif Berjalan	Rp 58.120.000
1.6	Aktiva Lain-Lain					
	Total Aktiva		Rp 337.875.000	Total Pasiva		Rp 337.875.000

Gambar 4.3 Laporan posisi keuangan BUMDes Raja Mandiri Raja

Laporan posisi keuangan menyajikan aktiva yang berisi aset lancar dan aset tidak lancar dan passiva yang berisi informasi mengenai kewajiban dan ekuitas yang dimiliki BUMDes. Gambar Laporan posisi keuangan di atas menunjukkan bahwa adanya penggolongan sisi Aktiva dan Passiva dan BUMDes Raja Mandiri Raja sudah menyajikan Laporan posisi keuangan yang sesuai dengan SAK-ETAP karena dalam Laporan posisi keuangan sudah memenuhi syarat pos minimal dalam penyusunan Laporan posisi keuangan yang tepat sesuai dengan SAK-ETAP.

2. Laporan Laba Rugi

LAPORAN LABA / RUGI (MIKRO FINANCE) DAN LAPORAN OPERASIONAL BUMDES RAJA MANDIRI RAJA PERIODE 1 JANUARI -31 DESEMBER 2021 DESA RAJA KEC. BUA KAB LUWU			
No	BULAN	PENDAPATAN	JUMLAH
4.1	Januari	-	
	Februari	Rp 16.400.000	
	Maret	Rp 7.000.000	
	April	Rp 8.600.000	
	Mei	Rp 6.400.000	
	Juni	Rp 7.000.000	
	Juli	Rp 8.200.000	
	Agustus	Rp 7.600.000	
	September	Rp 8.500.000	
	Oktober	Rp 6.900.000	
	November	Rp 6.620.0000	
	Desember	-	
		Jumlah	Rp 83.220.000
No	BIAYA	JUMLAH	
5.1	1. Honor Pengurus	Rp 18.000.000	
5.1.2	2. Administrasi dan umum	Rp 1.000.000	
5.1.3	3. Transportasi 300.000 x 12	Rp 3.600.000	
5.1.4	4. Biaya tak berduga	Rp 1.000.000	
5.1.5	5. Biaya non operasional (tutup buku)	Rp 1.500.000	
	TOTAL BIAYA	Rp 25.100.000	
	Surplus/defisit berjalan	Rp 58.120.000	

Raja, 10 Januari 2022

Gambar 4.4 Laporan Laba Rugi BUMDes Raja Mandiri Raja

Laporan Laba Rugi memasukkan semua pos penghasilan dan beban yang diakui dalam suatu periode kecuali SAK-ETAP mensyaratkan lain. SAK-ETAP mengatur perlakuan berbeda terhadap dampak koreksi atas kesalahan perubahan kebijakan akuntansi yang disajikan sebagai penyesuaian terhadap periode yang lalu dan bukan sebagai bagian dari laba atau rugi dalam periode terjadinya perubahan. Gambar Laporan Laba/Rugi diatas menunjukkan bahwa BUMDes Raja Mandiri Raja telah menyajikan laporan Laba/Rugi dimana terdapat penggolongan akun Pendapatan dan Beban pada periode tertentu.

Format Laporan laba Rugi BUMDes Raja Mandiri Raja yaitu *single Step* dimana semua pendapatan ditempatkan dibagian atas semua dan semua beban ditempatkan dibawah dan dijumlahkan, dengan demikian maka pendapatan dikurangi dengan beban dan hasilnya merupakan laba bersih.

Dari Uraian diatas dapat disimpulkan bahwa penyajian laporan Laba/Rugi pada BUMDes Raja Mandiri Raja sudah sesuai dengan prinsip SAK-ETAP. Selain kesesuaian bentuk Laporan posisi keuangan dan laporan laba/rugi, dalam laporan keuangan yang dibuat juga tidak lengkap. Yaitu tidak adanya laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Selain membuat Laporan posisi keuangan dan Laporan Laba/Rugi , BUMDes Raja Mandiri Raja juga membuat laporan keuangan sebagai berikut :

1. Laporan Pembagian Jasa BUMDes Raja Mandiri Raja

LAPORAN PEMBAGIAN JASA BUMDES RAJA MANDIRI RAJA DESA RAJA TAHUN 2021				
No	SISA HASIL USAHA (SHU) RP 58.120.000	BESARNYA PEMBAGIAN	KETERANGAN	
1.	Penambahan Modal Usaha	50%	Rp 29.060.000	-
2.	Pendapatan Asli Desa	25%	Rp 14.530.000	-
3.	Bonus Pengurus	15%	Rp 8.718.000	-
4.	Bonus Penasehat dan Pengawas	5%	Rp 2.906.000	-
5.	Dana Sosial	5%	Rp 2.906.000	-
	Jumlah	100%	Rp 58.120.000	-

Raja, 10 Januari 2022

Pengurus Bumdes,

Ketua	Sekertaris	Bendahara
ABD. MALIK MUH. RIDWAN, S.Pd	NURPADILA, S.Pd	JUMRIAH ABD. WAHAB, SE

Diketahui,
Kepala Desa Raja

TAWAKKAL

Gambar 4.5 Laporan Pembagian Jasa BUMDes Raja Mandiri Raja

4.4.2 Analisis Faktor-Faktor Penyebab Ketidaksesuaian Laporan

Keuangan BUMDes Raja Mandiri Raja Di Desa Raja Mandiri Raja

Faktor penyebab ketidaksesuaian laporan keuangan BUMDes Raja Mandiri Raja sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntansi Publik (SAK ETAP) yaitu karena ketidaktahuan pengurus tentang akuntansi yang baik dan benar secara umum seperti yang diungkapkan oleh Ketua BUMDes Raja Mandiri Raja berikut ini :

“Kalau menurut saya nak telah sesuai dengan yang diajarkan oleh pendamping Desa, karena disini kami didampingi oleh pendamping desa dalam penyusunan laporan keuangan dan SDM pas- pasan juga untuk orang ahli akuntansi mungkin kurang. Tapi namanya juga kita laporan kepada pemerintah desa, bahkan kecamatanpun sudah kami kasih itu laporan keuangan dan alhamdulillah diterima walaupun masih ada evaluasi ”(Abdul Malik,wawancara, 27 Mei (2022)

Dari hasil wawancara yang telah saya lakukan diatas dengan salah satu informan, maka dapat saya simpulkan bahwa staf BUMDes Raja Mandiri Raja kurang memahami apa yang dimaksud dengan standar akuntansi yang ada salah satunya yaitu SAK-ETAP, dimana para Staf baru mendengar dan mengetahui apa itu SAK-ETAP setelah saya melakukan penelitian, dan juga mereka hanya membuat laporan keuangan berdasarkan pengalaman dari staf kantor sebelumnya, yang kemudian diturunkan kepada staf yang baru dan menurut mereka laporan keuangan tersebut telah sesuai dengan standar yang berlaku karena selama ini mereka melaporkan Laporan keuangannya Kepada Pimpinan, bahkan kecamatan sekalipun dan tidak mengalami kendala apapun.

Pernyataan tersebut didukung dengan pernyataan Ibu Jumriah selaku bendahara pada BUMDes Raja Mandiri Raja berikut ini:

“jika menurut kami sudah sesuai dek, hanya saja sesuai standar akuntansi apalagi yang adek katakan tadi SAK-ETAP, mungkin masih kurang dan masih belum sesuai, apalagi saya baru dengar itu SAK-ETAP juga ” (Jumriah, wawancara, 27 Mei 2022)

Dan diperkuat oleh pernyataan Nurpadila selaku sekretaris BUMDes Raja Mandiri

Raja berikut :

“sementara ini belum dek. Penyusunan Laporan keuangan itu disusun berdasarkan yang diajarkan oleh pendamping desa dan kebetulan saya juga baru dengar itu SAK-ETAP, sebelumnya tidak pernah saya dengar ” (Nurpadila, wawancara, 27 Mei 2022).

Dari wawancara yang telah saya lakukan dengan informan, maka saya dapat menyimpulkan bahwa selain ketidaktahuan pengurus perihal pembuatan laporan keuangan yang baik dan benar, sebelumnya juga belum pernah diadakan sosialisasi atau pelatihan tentang tata cara pembuatan laporan keuangan yang baik dan benar baik dari pemerintah desa maupun dari pemerintah pusat yang mereka dapatkan hanya instruksi dari pendamping desa yang dimana mereka hanya disuruh untuk mencatat secara sederhana asal catatan tersebut dapat dibaca oleh mereka. Tidak adanya pelatihan tentang pembuatan laporan keuangan dari pemerintah yang sesuai dengan standar SAK ETAP diungkapkan oleh Abdul Malik selaku ketua pada BUMDesa Raja Mandiri Raja.

“Kalau dari desa jelas tidak ada, kemarin ada dari pemerintah yang disebut sebagai pendamping desa untuk mendampingi desa utamanya dalam pembuatan laporan keuangan, tapi yang terjadi dikami pendamping desa itu hanya datang tiap bulan melihat transaksi kami, tidak fokus pada laporan keuangan . Cuman semacam datang tiap bulan sekali untuk melihat laporan harian dan lain sebagainya untuk detailnya selama ini memang tidak sedetil seperti laporan keuangan yang akuntansi itu nak” (Abdul Malik, wawancara, 27 Mei 2022)

Pernyataan ketua didukung oleh pernyataan dari bendahara BUMDes Raja Mandiri Raja berikut :

“selama ini tidak ada pendampingan khusus seperti pelatihan yang diberikan kepada kami dek, hanya sekali itupun pada periode sebelumnya karena kebetulan saya juga baru 2 bulan menjabat sebagai bendahara jadi masih kurang tahu tentang BUMDes , tapi setahu saya, ada itu pendamping desa yang datang tiap bulan sekali itupun Cuma untuk melihat laporan harian lalu mereka pulang” (Jumriah, wawancara, 27 Mei 2022).

Pernyataan dari ketua dan bendahara diperkuat juga oleh pernyataan Ibu Nurpadila selaku sekretaris sebagai berikut :

Tidak hanya kurangnya pengetahuan pengurus tentang pengetahuan akuntansi yang baik dan benar, namun juga ditambah dengan ketidaktahuan pengurus tentang SAK ETAP yang seharusnya diterapkan dalam pembuatan laporan keuangan BUMDes Raja Mandiri Raja dan juga SDM Pada BUMDes tersebut merupakan S1 pada pendidikan dan komputer yang tidak memiliki pengetahuan tentang akuntansi itu sendiri. Ketidaktahuan pengurus mengenai SAK ETAP diungkapkan ketua BUMDes Raja Mandiri Raja sebagai berikut:

“Tidak tahu. Apa itu Nak ” (Abdul Malik, wawancara, 27 Mei 2022).

Pernyataan tersebut juga didukung oleh pernyataan Ibu Jumriah selaku bendahara sebagai berikut:

“Tidak tahu nak, Apa itu ?” (Jumriah, wawancara, 27 Mei 2022).

Selain kurangnya pengetahuan pengurus tentang akuntansi terutama SAK ETAP dan tidak adanya sosialisasi atau pelatihan dari pemerintah perihal pembuatan laporan keuangan, latar belakang pengurus yang tidak berasal dari akuntansi juga diketahui berpengaruh terhadap ketiaksesuaian pembuatan laporan keuangan selama ini. Hal tersebut diketahui dari pernyataan ketua BUMDes berikut ini :

“Kalau saya sendiri itu SLTA nak, kalau bendahara itu lulusan S1 komputer dan Sekretaris S1 Pendidikan” (Abdul Malik, wawancara, 27 Mei 2022)

Hal tersebut selaras dengan yang diungkapkan oleh sekretaris BUMDes Raja Mandiri Raja berikut ini :

“Tidak ada dek, kita semua tidak ada yang dari akuntansi” (Nurpadila, wawancara, 27 Mei 2022).

Dari beberapa penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa latar belakang Pendidikan seseorang dapat menjadi faktor pendukung dalam menjalankan

pekerjaannya. Termasuk yang menjadi kendala pada BUMDes Raja Mandiri Raja dalam pembuatan laporan keuangan yang sesuai dengan SAK ETAP dikarenakan tidak adanya pengetahuan mengenai ilmu akuntansi dikarenakan latar belakang Pendidikan yang berbeda.

4.4.3 Analisis Kendala BUMDes Di Desa Raja Mandiri Raja Menyusun Laporan Keuangan Sesuai SAK ETAP

Ketidaksesuaian laporan keuangan yang dibuat oleh BUMDes Raja Mandiri Raja selama ini tidak lepas dari adanya kendala dalam menyusun laporan keuangan. Bapak Abdul Malik selaku Ketua BUMDes Raja Mandiri Raja mengungkapkan kendala yang dihadapi seperti berikut:

“kapasitas orang nak, beda-beda jadi tidak ada yang ahli dalam hal itu nak” (Abdul Malik, wawancara, 27 Mei 2022).

Pernyataan tersebut didukung oleh ibu Jumriah selaku Bendahara yang menyampaikan sebagai berikut

“Kendalanya ya itu tadi nak , tidak ada yang lulusan akuntansi dan paham mengenai akuntansi jadi tidak tahu cara menyusunnya ” (Jumriah, wawancara, 27 Mei 2022).

Dari wawancara yang saya lakukan dengan Para Informan, maka saya dapat menyimpulkan bahwa Ketidaksesuain laporan keuangan pada BUMDes Raja Mandiri Raja dikarenakan ketidaktahuan mereka dalam menyusun laporan keuangan sesuai standar yang berlaku, Hal ini disebabkan oleh latarbelakang Pendidikan yang berbeda. Dimana Para Staf mengatakan bahwa mereka tidak ada yang lulusan dari akuntansi dan juga tidak ada yang paham akan hal penyusunan dan pelaporan laporan keuangan.

4.4.4 Analisis Upaya Yang Dapat Dilakukan Agar Penyusunan Laporan Keuangan Sesuai dengan SAK ETAP

Agar laporan keuangan yang nantinya disusun oleh BUMDes Raja Mandiri Raja sesuai dengan Standart Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntansi Publik (SAK ETAP) perlu adanya upaya dalam mengatasi faktor-faktor yang menyebabkan ketidaksesuaian laporan BUMDes Raja Mandiri Rajasesuai SAK ETAP. Bapak Abdul Malik selaku Ketua BUMDes Raja Mandiri Raja mengungkapkan harapannya agar kedepannya laporan keuangan yang dibuat bisa sesuai dengan SAK ETAP sebagai berikut :

“semoga kedepannya ada pendampingan dari pemerintah pusat sampai dengan pemerintah desa supaya nanti apanya yang kurang bisa dievaluasi dan diperbaiki” (Abdul Malik, wawancara, 27 Mei 2022).

Selain adanya evaluasi, Bendahara BUMDes Raja Mandiri Raja mengungkapkan harapannya sebagai berikut :

“semoga kedepannya ada pelatihan paling tidak tingkat kabupaten/Desa untuk kami sebagai pengurus BUMDes, terlebih untuk saya selaku Bendahara dan juga ke Sekretaris” (Jumriah, wawancara, 27 Mei 2022).

Harapan yang sama juga diungkapkan oleh Ibu Nurpadila selaku Sekretaris BUMDes Raja Mandiri Raja sebagai berikut:

“Semoga lebih baik kedepannya, maksud saya paling tidak kita dapat pelatihan untuk pembuatan pelaporan, apalagi kit aini tidak ada dasar pengetahuna mengenai akuntansi” (Nurpadila, wawancara, 27 Mei 2022).

Selain ketidaktahuan pengurus perihal pembuatan laporan keuangan yang baik dan benar, sebelumnya juga belum pernah diadakan sosialisasi atau pelatihan tentang tata cara pembuatan laporan keuangan yang baik dan benar baik dari pemerintah

desa maupun dari pemerintah pusat. Sehingga sangat diharapkan agar pihak pemerintah dapat memberikan pelatihan ataupun sosialisasi kepada para pengurus BUMDesa Raja Mandiri Raja untuk menghindari terjadinya kekeliruan dapat penyusunan laporan keuangan.

4.5 Ringkasan Hasil Wawancara

4.5.1 Triangulasi Sumber

Tabel 4.5.1 Triangulasi Sumber

No	Pertanyaan	Hasil wawancara Informan			Tafsiran
		1	2	3	
1	Apa saja transaksi terkait usaha yang dijalankan oleh BUM Desa Raja Mandiri raja selama ini ?	Pemberkasan <i>fotocopy</i> KTP, KK, dan surat pernyataan peminjaman untuk usaha Simpan Pinjam	Simpan Pinjam	Simpan Pinjam	Simpan Pinjam
2	Apakah setiap transaksi dicatat atau terdapat catatannya ?	Dicatat, yang catat Ibu bendahara /Sekretaris	Ada catatannya	Dicatat, ada kwitansi	Setiap transaksi dicatat
3	Bagaimana proses pencatatan	Saat ada nasabah yang ingin	Saat ada nasabah yang mau	Langsung dicatat	Proses pencatatan yaitu

<p>apabila terjadi transaksi ?</p>	<p>meminjam uang, maka transaksinya langsung dicatat</p>	<p>mengajukan pinjaman, harus menyetorkan <i>fotocopy</i> KTP, KK, dan mengisi surat pernyataan diatas materai terlebih dahulu, kemudian jumlah pinjaman diterima baru dicatat dalam buku pembayaran angsuran yang didalamnya ada No.faktur, nama anggota, jumlah pinjaman, angsuran okok & bunga dan tanggal pembayaran tiap bulan</p>	<p>langsung dicatat apabila ada transaksi</p>
------------------------------------	--	---	---

4	Siapa yang mencatat apabila terjadi transaksi ?	Bendahara dan Sekretaris	Bendahara dan Sekretaris	Sekretaris pencatatan dan bendahara pencairan	Bendahara dan Sekretaris
5	Apa saja dokumen yang digunakan oleh BUM Desa Raja Mandiri raja selama ini ?	Buku Peminjaman dan Pengembalian	Buku Kas Simpan Pinjam	Buku Angsuran/ Buku Bulanan	Buku pembayaran angsuran nasabah
6	Apakah selama ini BUM Desa Raja Mandiri raja sudah membuat laporan keuangan ?	Sudah buat laporan Keuangan	Ada laporan keuangan setiap tahun	Ada laporan keuangan, harusnya triwulan tapi karena ada kelonggaran dari pimpinana jadi kami buat yang tahunan tetapi dari pimpiana tetap melihat laporan keuangan bulanan	Ada laporan keuangan per tahun

7	Apakah sebelumnya ada penyuluhan terkait pembuatan laporan keuangan ?	Ada bimbingan dari Pendamping Desa	Ada Pendamping dari Desa	Tidak tahu karena saya baru 2 bulan menjabat	Belum ada penyuluhan pembuatan laporan keuangan tapi ada pendampingan dari Desa
8	Apakah Bapak/Ibu tahu bagaimana proses pembuatan dan laporan keuangan yang baik dan benar ?	Tidak tahu	Tidak tahu bagaimana laporan keuangan yang baik dan benar karena laporan keuangan yang dibuat itu berdasarkan yang diajarkan oleh pendamping desa	Yang buat sekretaris jadi saya tidak tahu	Direktur, Sekretaris dan Bendahara BUMDes Raja Mandiri Raja tidak mengetahui bagaimana proses pembuatan laporan keuangan yang baik dan benar
9	Apakah menurut Bapak/ Ibu laporan keuangan yang dibuat selama ini	Telah sesuai	Telah sesuai	Telah sesuai dengan yang diajarkan oleh Pendamping Desa	Telah sesuai dengan yang diajarkan oleh

	sudah dengan ketentuan dan prosedur yang ada?				Pendamping Desa
10	Apa yang Bapak/Ibu ketahui tentang SAK ETAP ?	Tidak tahu	Tidak tahu	Tidak tahu, baru pertama kali dengar	Tidak tahu
11	Bagaimana pembuatan laporan keuangan BUM Desa Raja Mandiri raja selama ini?	Bagus, pendamping mengakui	Dibuat berdasarkan yang diajarkan oleh Pendamping Desa	Dibuat sesuai dengan yang diajarkan pendamping desa	Dibuat berdasarkan yang diajarkan oleh Pendamping Desa
12	Siapa yang membuat laporan keuangan selama ini ?	Sekretaris	Sekretaris	Sekretaris	Sekretaris
13	Apa saja isi laporan keuangan yang selama	Sekretaris yang mengurus	Kas, Laporan posisi keuangan dll.	Laporan posisi keuangan, Laporan L/R dan Laporan	Laporan posisi keuangan, Laporan L/R, Lapora

	ini telah dibuat ?			pembagian jasa	n pembagian jasa
14	Kapan laporan keuangan tersebut dibuat ?	Dibuat pada akhir tahun	Dibuat pada akhir tahun	Dibuat pada akhir tahun	Dibuat pada akhir tahun
15	Apa saja kendala yang dihadapi dalam pembuatan laporan keuangan ?	SDM yang kurang mengetahui akuntansi dan kapasitas orang yang berbeda-beda	Tidak ada dasar akuntansi, dan juga belum ada penyuluhan dan dilatih membuat laporan keuangan , hanya pendampingan dari desa	Belum terlalu tahu karena baru 2 bulan menjabat	Penyusunan laporan keuangan terkendala pada kurangnya SDM yang tidak mengetahui akuntansi dan belum adanya pelatihan mengenai pembuatan laporan keuangan, hanya dampingan dari desa
16	Apa harapan	Semoga lebih baik	Semoga lebih baik	Semoga lebih baik	Adanya Evaluasi

Bapak/Ibu agar laporan BUM Desa Raja Mandiri raja lebih baik dan sesuai dengan ketentuan yang ada?	kedepannya, pemerintah pusat sampai dengan desa tetap ada kontribusi terutama pada pendanaan dan pendampingan	kedepannya dan semoga ada penyuluhan terkait pembuatan lapora keuangan	kedepannya, ada evaluasi dan harapannya sembako, bantuan dll itu BUMDes yang Kelola	pemerintah pusat sampai dengan desa tetap ada kontribusi terutama pada pendanaan dan pendampingan uga adanya penyuluhan tentang pembuatan lapora keuangan yang baik
--	---	--	---	---

4.5.2 Triangulasi Metode

Tabel 4.5.2 Triangulasi Metode

No.	Pertanyaan	Wawancara	Dokumen	Observasi	Tafsiran
1	Apa saja transaksi terkait usaha yang dijalankan oleh BUM Desa Raja	Simpan Pinjam	Kwitansi peminjaman, buku angsuran pembayaran nasabah,	Terdapat Kwitansi peminjaman, buku angsuran pembayaran nasabah,	Kwitansi peminjaman, buku angsuran pembayaran nasabah,

	Mandiri raja selama ini ?				
2	Apakah setiap transaksi dicatat atau terdapat catatannya ?	Setiap transaksi dicatat	Terdapat buku pencatatan yang diberi nama buku pembayaran angsuran nasabah	Setiap transaksi dicatat pada buku untuk pembayaran angsuran nasabah	Transaksi dicatat berdasarkan tanggal transaksi yang dicatat pada bukupembyaran angsuran nasabah
3	Bagaimana proses pencatatan apabila terjadi transaksi ?	1. Penerimaan data konsumen 2. Mengisi surat perjanjian dan menandatangani materai 3. Penyerahan uang (peminjaman) 4. Penerimaan	Penerimaan (pembayaran) angsuran/pendapatan usaha simpan pinjam dari nasabah	1. Penerimaan data konsumen 2. Mengisi surat perjanjian dan menandatangani materai 3. Penyerahan uang (peminjaman) 4. Penerimaan angsuran/pendapatan usaha simpan pinjam dari nasabah	1. Penerimaan data konsumen 2. Mengisi surat perjanjian dan menandatangani materai 3. Penyerahan uang (peminjaman) 4. Penerimaan

		angsuran/pendapatan usaha simpan pinjam dari nasabah			angsuran/pendapatan usaha simpan pinjam dari nasabah
4	Siapa yang mencatat apabila terjadi transaksi ?	Sekretaris dan bendahara	Tidak Ada	Sekretaris pencatatan dan Sekretaris pencatatan dan juga pencairan	Sekretaris pencatatan dan Sekretaris pencatatan dan juga pencairan
5	Apa saja dokumen yang digunakan oleh BUM Desa Raja Mandiri raja selama ini ?	Buku peminjaman dan pengembalian, Buku kas simpan pinjam dan buku angsuran/ buku bulanan	Buku pencatatan pembayaran angsuran nasabah	Buku pencatatan pembayaran angsuran nasabah	Buku pencatatan pembayaran angsuran nasabah
6	Apakah selama ini BUM Desa Raja Mandiri raja sudah membuat	BUMDes Raja Mandiri Raja sudah membuat laporan keuangan sejak tahun	Laporan keuangan 2015 s/d 2021	Laporan keuangan 2015 s/d 2021	Sudah ada, yaitu Laporan keuangan 2015 s/d 2021

	laporan keuangan ?	2015 sampai dengan 2021			
7	Apakah sebelumnya ada penyuluhan terkait pembuatan laporan keuangan ?	Ada pendampingan dari Desa	Tidak ada	Tidak ada	Pengurus BUMDes Raja Mandiri Raja di damping oleh pendamping desa dalam penyusunan laporan keuangan
8	Apakah Bapak/Ibu tahu bagaimana proses pembuatan dan laporan keuangan yang baik dan benar ?	Direktur, Sekretaris dan Bendahara BUMDes Raja Mandiri Raja tidak mengetahui bagaimana proses pembuatan laporan keuangan	Tidak ada	Tidak ada	Direktur, Sekretaris dan Bendahara BUMDes Raja Mandiri Raja tidak mengetahui bagaimana proses pembuatan laporan keuangan
9	Apakah menurut	Pengurus BUMDes	Hanya terdapat	Hanya terdapat	Beum sesuai dengan

	Bapak/ Ibu laporan keuangan yang dibuat selama ini sudah dengan ketentuan dan prosedur yang ada?	mengatakan jika laporan keuangan yang mereka buat telah sesuai dengan yang diajarkan oleh pendamping desa	Laporan posisi keuangan, Laporan L/R yang isinya telah sesuai dengan SAK-ETAP, tetapi belum menyajikan laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan Catatan atas laporan keuangan	Laporan posisi keuangan, Laporan L/R dan juga laporan pembagian jasa	ketentuan dan prosedur yang ada. Karena hanya menyajikan Laporan posisi keuangan, Laporan L/R, tetapi belum menyajikan laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan Catatan atas laporan keuangan
10	Apa yang Bapak/Ibu ketahui tentang SAK ETAP ?	Direktur, Sekretaris dan Bendahara BUMDes Raja Mandiri Raja tidak mengetahui SAK-ETAP	Tidak ada	Tidak ada	Direktur, Sekretaris dan Bendahara BUMDes Raja Mandiri Raja tidak

					mengetahui SAK-ETAP
11	Bagaimana pembuatan laporan keuangan BUM Desa Raja Mandiri raja selama ini?	Laporan keuangan BUM Desa Raja Mandiri raja dibuat berdasarkan yang diajarkan oleh Pendamping Desa	Tidak ada	Tidak ada	Laporan keuangan BUM Desa Raja Mandiri raja dibuat berdasarkan yang diajarkan oleh Pendamping Desa
12	Siapa yang membuat laporan keuangan selama ini ?	Laporan keuangan BUM Desa Raja Mandiri raja dibuat oleh sekretaris	Tidak ada	Tidak ada	Laporan keuangan BUM Desa Raja Mandiri raja dibuat oleh sekretaris
13	Apa saja isi laporan keuangan yang selama ini telah dibuat ?	Laporan posisi keuangan, Laporan L/R dan laporan pembagian jasa	Laporan posisi keuangan, Laporan L/R dan laporan pembagian jasa	Tidak ada	Laporan posisi keuangan, Laporan L/R dan laporan pembagian jasa

14	Kapan laporan keuangan tersebut dibuat ?	laporan keuangan dibuat setiap akhir tahun	Per tanggal 31 Desember 20021	Tidak ada	Per tanggal 31 Desember 20021
15	Apa saja kendala yang dihadapi dalam pembuatan laporan keuangan ?	Kendala yang dihadapi dalam pembuatan laporan keuangan adalah SDM yang kurang mengetahui akuntansi dan belum ada penyuluhan mengenai pembuatan laporan keuangan hanya dampingan dari pendamping desa	Tidak ada	Tidak ada	Kendala yang dihadapi dalam pembuatan laporan keuangan adalah SDM yang kurang mengetahui akuntansi dan belum ada penyuluhan mengenai pembuatan laporan keuangan hanya dampingan dari pendamping desa
16	Apa harapan Bapak/Ibu agar laporan	Adanya Evaluasi pemerintah	Tidak ada	Tidak ada	Adanya Evaluasi pemerintah

	<p>BUM Desa Raja Mandiri raja lebih baik dan sesuai dengan ketentuan yang ada?</p>	<p>pusat sampai dengan desa tetap ada kontribusi terutama pada pendanaan dan pendampingan uga adanya penyuluhan tentang pembuatan lapora keuangan yang baik</p>		<p>pusat sampai dengan desa tetap ada kontribusi terutama pada pendanaan dan pendampingan uga adanya penyuluhan tentang pembuatan lapora keuangan yang baik</p>
--	--	---	--	---

4.6 Pembahasan

Hasil analisis yang disajikan pada bagian ini bersumber dari hasil observasi, dokumen BUMDes Raja Mandiri Raja dan wawancara dengan Ketua, Bendahara dan Sekretaris BUMDes Raja Mandiri Raja. Berdasarkan hasil yang diperoleh dari kegiatan penelitian yang dilakukan dan melibatkan beberapa tiga narasumber maka dapat disajikan analisis sebagai berikut

4.6.1 Ketidaksesuaian Laporan Keuangan BUMDes Raja Mandiri Raja Sesuai SAK-ETAP

Penyusunan laporan keuangan haruslah mengikuti standar yang berlaku. Ketidaksesuaian penggolongan akun akan menyebabkan suatu laporan keuangan menjadi tidak relevan. Selain itu pengguna kepentingan tidak dapat mengetahui persis bagaimana kondisi keuangan perusahaan yang sebenarnya. Laporan keuangan BUMDes Raja Mandiri Rajayang selama ini hanya meliputi Laporan posisi keuangan dan laporan Laba/Rugi.

Ketidaksesuaian penyajian yang ada diantaranya adalah dapat dilihat dari terdapat beberapan bentuk laporan yang tidak dibuat dan juga pada laporan laba-rugi juga belum sepenuhnya dijelaskan dengan baik asal pendapatan yang didapat selama setahun, hanya melampirkan nama bulan bukan nama akun. Selain itu, laporan keuangan yang dibuat bukan yang ditetapkan SAK-ETAP yaitu Laporan posisi keuangan, laporan Laba/Rugi, Laporan perubahan ekuitas, Laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan, namun yang disajikan hanya Laporan posisi keuangan, Laporan Laba/Rugi Laporan pembagian jasa SHU (Sisa Hasil Usaha). Ketidaklengkapan penyajian juga dapat dilihat dari tidak diperhitungkannya

akumulasi penyusutan peralatan pada BUMDes Raja Mandiri Raja, tidak ada laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan Catatan atas laporan keuangan.

Laporan yang dibuat juga tidak dapat menggambarkan posisi atau keadaan usaha BUM Desa sebenarnya dan tidak dapat dibandingkan karena kesalahan penyusunan bentuk laporan keuangan, tidak dibuatnya laporan perubahan ekuitas laporan arus kas dan Catatan atas laporan keuangan. Selain itu aset atau peralatan yang dimiliki juga hanya dilaporkan sebagai laporan rincian penggunaan bantuan dari pemerintah desa pada tahun terjadinya transaksi atau pembelian aset tersebut dan tidak mencantumkan besaran aset tersebut ditahun pelaporan berikutnya walau keberadaan aset atau peralatan tersebut masih ada.

4.6.2 Faktor Penyebab Ketidaksesuaian Laporan Keuangan BUMDes Raja Mandiri Raja Di Desa Raja Mandiri Raja

1. Sumber Daya Manusia yang Kurang Memadai

Pengurus BUM Desa Raja Mandiri Raja selama ini sudah berusaha memaksimalkan dalam kepengurusan Badan Usaha Milik Desa ini yang bertempat di desa Raja Mandiri Raja kabupaten Luwu Kecamatan Bua. Salah satu bentuk pertanggung jawaban BUMDes Raja Mandiri Raja dalam mengelola dana desa dari tahun 2015 sampai tahun 2021 adalah dengan membuat laporan keuangan walaupun belum sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dalam hal ini adalah SAK ETAP. Hal tersebut dikarenakan ketidaktahuan pengurus mengenai dasar akuntansi dan standar akuntansi yang berlaku.

Hal tersebut dapat diketahui dari hasil wawancara yang telah dilakukan dengan tiga informan, yaitu Bapak Abdul Malik selaku ketua, Nurpadila,S.Pd selaku

sekretaris dan Jumriah, S.Kom selaku bendahara. Kurangnya pemahaman terkait akuntansi membuat BUMDes Raja Mandiri Raja membuat laporan keuangan seadanya. Hal tersebut membuat data yang disajikan tidak sesuai dengan standar penyajian laporan keuangan, baik secara umum maupun SAK ETAP yang seharusnya diterapkan. Selain itu, data yang disajikan tidak lengkap, tidak dapat dibandingkan dan tidak menggambarkan keadaan usaha yang sebenarnya.

Kurangnya pengetahuan akuntansi pengurus BUMDes Raja Mandiri Raja juga terlihat pada catatan transaksi yang ada masih sederhana dan tidak sesuai dengan prosedur pencatatan transaksi sesuai standar akuntansi pada umumnya. Hanya ada buku pencatatan buku kredit pinjaman dan buku pembayaran angsuran nasabah secara sederhana dan belum terkomputerisasi. Selain itu, tidak terdapat jurnal setiap terjadi transaksi akuntansi, tidak adanya buku besar, pengeluaran operasional dicatat pada buku seadanya dan tidak dalam satu catatan sehingga memungkinkan terjadinya ketidaklengkapan catatan.

2. Kurangnya Kesadaran terhadap Pentingnya Laporan Keuangan dari Pemerintah Desa

Pengurus BUMDes Raja Mandiri Raja selama ini menyadari bahwa laporan keuangan yang selama ini dibuat tidaklah sesuai dengan standar akuntansi yang ada. Walaupun begitu hal tersebut tetap berlanjut dan tidak ada perbaikan dikarenakan tidak adanya tanggapan dari pemerintah desa mengenai keluhan dari pengurus, yaitu bendahara BUMDes.

Laporan keuangan yang selama ini dibuat dan dilaporkan kepada petinggi desa Raja Mandiri Raja, Kecamatan dan Kabupaten tidak menuai kritik ataupun tidak

adanya koreksi. Sehingga dari pengurus merasa yang dibuat sudah cukup. Dari pemerintah desa yaitu Kepala Desa dan Pengurus Kecamatan hanya melihat besarnya laba yang dilaporkan dan tidak melihat aspek laporan keuangan yang lain.

3. Tidak Adanya Sosialisasi atau Penyuluhan Terkait Pembuatan Pelaporan Keuangan

Keterbatasan pengetahuan akuntansi harusnya didukung dengan adanya upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dari pemerintah. Namun seperti yang dinyatakan oleh ke tiga informan, bahwa dari sampai sekarang dari BUMDes Raja Mandiri Raja berjalan, dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2022 belum ada sosialisai terkait pembuatan laporan keuangan baik dari pemerintah desa maupun pemerintah pusat. Hal tersebut membuat pengurus BUMDes membuat laporan keuangan selama ini menurut argumen dan hasil musyawarah mereka tanpa menghiraukan prinsip atau standar akuntansi yang berlaku.

4.6.3 Kendala BUMDesa Raja Mandiri Raja Dalam Menyusun Laporan Keuangan Sesuai SAK ETAP

Kendala yang dihadapi oleh BUM Desa Raja Mandiri Raja dalam penyusunan laporan adalah SDM yang kurang mengetahui akuntansi dan belum ada penyuluhan mengenai pembuatan laporan keuangan hanya dampingan dari pendamping desa dan sulitnya mencari pengurus yang mampu dalam hal kompetensi akuntansi untuk menjadi pengurus BUMDes Raja Mandiri Raja .

4.6.4 Upaya Yang Dapat Dilakukan Agar Penyusunan Laporan Keuangan Sesuai Dengan SAK ETAP

Beberapa faktor dan kendala penyebab ketidaksesuaian dalam penyusunan laporan keuangan BUMDes Raja Mandiri Raja haruslah segera diatasi. Oleh karena itu perlu adanya upaya dalam mengatasi hal tersebut. Berikut ini adalah upaya yang dapat dilakukan oleh BUMDes Raja Mandiri Raja:

1. Memperbaiki proses pencatatan akuntansi dengan setidaknya mengadakan pembuatan jurnal untuk pencatatan transaksi harian yang terjadi dan membuat buku besar untuk menggolongkan setiap akun agar diketahui saldo pada setiap akunnya.
2. Melakukan perhitungan ulang terhadap nilai aset yang ada guna penyusunan Laporan keuangan.
3. Membuat laporan kesulitan, khususnya laporan kesulitan dalam menyusun laporan keuangan. Sesuai instruksi Pemerintah Kabupaten Luwu yang menyebutkan bahwa Kepala Desa agar memerintahkan Ketua BUMDes membuat laporan kesulitan.
4. Melakukan perekrutan pengurus dengan SDM yang cukup untuk kepengurusan berikutnya.
5. Menyelenggarakan pelatihan penyusunan laporan keuangan terhadap pengurus BUMDes Raja Mandiri Raja.
6. Membuat jadwal audit internal agar terdapat evaluasi setiap tahun

4.6.5 Akibat Ketidaksesuaian Laporan Keuangan BUM Desa Raja Mandiri

Raja berdasarkan SAK ETAP

Akibat ketidaksesuaian dalam penyusunan laporan keuangan dapat menyebabkan hal berikut ini:

1. Tidak dapat dijadikan sebagai landasan untuk membuat keputusan bagi pihak-pihak yang berkepentingan karena laporan yang dibuat tidak relevan.
2. Laporan keuangan dengan kesalahan material akan membuat laporan keuangan bersifat tidak andal atau *non reability*.

BAB V

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dengan metode kualitatif menggunakan pendekatan fenomenologi dengan teknik observasi, wawancara, dan telaah dokumen yang dilaksanakan di BUMDes Raja Mandiri Raja yang terletak di Desa Raja Kecamatan Bua Kabupaten Luwu tentang penyusunan laporan keuangan BUMDes berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dapat diambil beberapa kesimpulan :

1. Sesuai data yang diperoleh peneliti, BUMDes Raja Mandiri Raja belum menerapkan SAK-ETAP. BUMDes Raja Mandiri Raja tidak membuat laporan keuangan yang sesuai dengan SAK-ETAP, Adapun laporan keuangan tersebut adalah:
 - a. Laporan Posisi Keuangan
 - b. Laporan Laba/Rugi
 - c. Laporan Perubahan Ekuitas
 - d. Laporan Arus Kas
 - e. Catatan Atas Laporan Keuangan

BUMDes Raja Mandiri Raja hanya membuat dua laporan keuangan yang terdapat diatas yaitu Laporan Posisi Keuangan dan Laporan laba/Rugi

2. Faktor penyebab ketidaksesuaian penyusunan laporan keuangan BUMDes Raja Mandiri Raja yaitu SDM pengurus kurang memadai, tidak adanya pelatihan

bagaimana penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan SAK ETAP dari pemerintah desa atau pihak terkait dan kurangnya kesadaran terhadap pentingnya laporan keuangan dari pemerintah desa.

1.2 Saran

Dari hasil yang diteliti diharapkan penelitian ini bermanfaat untuk beberapa pihak yang bersangkutan.

a. Bagi Penulis

Saran untuk peneliti berikutnya yaitu dapat mengkaji dengan lebih banyak sumber terutama dengan menambahkan informan dari Pemerintah Desa yang terkait dengan Pelaporan Keuangan BUMDes.

b. Bagi Akademisi

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat diuji dengan metode kuantitatif untuk memperkuat hasil penelitian sebelumnya dan menguji bagaimana pengaruh faktor-faktor yang menyebabkan ketidaksesuaian penyusunan laporan keuangan yang telah ditemukan pada penelitian ini.

c. Bagi BUMDes

BUMDes Raja Mandiri Raja diharapkan mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan yang selama ini telah dibuat. BUMDes Raja Mandiri Raja sebaiknya membuat laporan keuangan sesuai SAK ETAP yaitu menyajikan laporan keuangan secara lengkap dengan aturan yang berlaku dari laporan posisi keuangan sampai dengan Catatan atas laporan keuangan. Hal ini agar para pengguna laporan keuangan dapat mengetahui langkah apa yang harus diambil dalam pengambilan keputusan..

Selain itu, Pemerintah Desa diharapkan dapat lebih memperhatikan perkembangan BUMDesa di desanya dan membantu memberikan solusi pada setiap masalah yang dihadapi oleh BUM Desa di desanya terutama dalam penyusunan laporan keuangan. Diharapkan pemerintah dapat memberikan penyuluhan pentingnya membuat laporan keuangan. Pemerintah desa juga diharapkan dapat membuat peraturan tentang keharusan pembuatan laporan keuangan, minimal laporan keuangan sederhana mengingat modal yang digunakan untuk menjalankan usaha BUMDes ini dari pemerintah maka haruslah dapat dipertanggung jawabkan. Penyelenggaraan program pelatihan pembuatan laporan keuangan untuk pengurus BUMDes juga sangatlah penting agar dapat menunjang pengetahuan dan meningkatkan kualitas SDM pengurus BUMDes terkait penyusunan laporan keuangan yang baik dan benar berdasarkan SAK ETAP.

1.3 Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat keterbatasan selama proses penelitian, diantaranya :

1. Waktu penelitian yang relatif pendek, sehingga pengamatan terhadap proses pembuatan laporan keuangan BUMDes Raja Mandiri Raja menjadi terbatas.
2. Terbatasnya informan hanya pada pengurus BUMDes saja dikarenakan baru diketahui setelah selesai dilakukan wawancara bahwa terdapat pengaruh Pemerintah Desa, Kecamatan dan Kota terhadap ketidaksesuaian penyusunan laporan keuangan yang disusun oleh BUMDes Raja Mandiri Raja selama ini.

1.4 Agenda Penelitian yang Akan Datang:

Sebagai rekomendasi untuk penelitian yang akan datang , penulis menyarankan untuk :

1. Mengakji faktor-faktor mempengaruhi ketidaksesuaian peyusunan laporan keuangan BUM Desa Raja Mandiri Raja
2. Menambahkan narasumber yang berasal dari pemerintah desa dan kecamatan guna memperkuat hasil penelitian.
3. Menguji kembali dengan metode kuantitatif untuk memperkuat hasil penelitian

DAFTAR RUJUKAN

- Creswell J.W. 2013. *Research Design Qualitative Quantitative and Mixed Methods Approaches* (4th ed.).Sage Publication.Singapore
- Gunanda, R. (2020). *Analisis penerapan standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik (sak etap) pada laporan keuangan badan usaha milik desa (bumdes) al-kaustar desa kampung baru sentajo periode 2014-2018. Skripsi.*
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2016). *Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik* (5th ed.).Salemba Empat.Jakarta.
- Indah Sari Sinaga,D., Nurlaila,N., & Daim Harahap, R.(2022).*Analisis Penerapan Sak Etap Pada Bumdesa Yang Ada Di Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan. SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan, 1(3), 97–118.*
<https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i3.16>
- Kusrini, H. (2020). *Analisis Penerapan SAK ETAP pada Laporan Keuangan BUMDES Kamboja Desa Cinta Raja.* 1–63.
- Lexy J. Moleong. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* PT Remaja Rosda karya Bandung
- Lintong, J. S., Limpeleh, E. A. N., & Sungkowo, B. (2020). *Laporan Keuangan Berdasarkan SAK ETAP pada BUMDes “Kineauan” Desa Wawona Kabupaten Minahasa Selatan. Jurnal Bisnis Dan Kewirausahaan, 16(1),.*
<https://doi.org/10.31940/jbk.v16i1.1597>
- Peraturan Menteri Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 *Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Perubahan Badan Usaha Milik Desa.*
- Pramitari, I., Nurhayanti, K., & Suningsih, S. L. P. Y. (2020). *Penerapan Sak Etap Pada Unit Jasa Pengelolaan Sampah Bumdes Desa Buduk. Seminar Nasional Terapan Riset Inovatif (SENTRINOV), 6(2), 246–253.*
<https://proceeding.isas.or.id/index.php/sentrinov/article/view/463>
- Raco, Jozef. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya.* ed. Arita L. PT Grasindo, Jalan Palmerah Selatan.Jakarta.
- Rizqi, P. A. (2019). Penyusunan Laporan Keuangan Bum Desa Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (Sak Etap). *E-Akuntansi, S I.* <https://www.e-akuntansi.com/sak-etap/#:~:text=SAK ETAP adalah Standar Akuntansi,akuntabel untuk publik secara luas.&text=SAK>

ETAP ini dimaksudkan agar, dengan standar yang telah ditetapkan.

Rudini, Nurhayati, A. (2016). *Analisis Penerapan SAK ETAP Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Langkitin Di Desa Langkitin*. 1–6.

Saputra, D. (2021). *Analisis Penerapan Akuntansi Pada Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) X Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu*. *Valuta*, 7(2), 92–109. <https://journal.uir.ac.id/index.php/valuta/article/view/8014/3675>

Saputra, R. A., Pribadi, C., Fadillah, H., Studi, P., Fakultas, A., & Universitas, E. (2019). *Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Pada Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Cibodas Desa Cibodas Kecamatan Cibitung Kabupaten Sukabumi*.

Sirait, A. A. U., Sopanah, A., & Dewi N, I. (2021). *Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (Sak Etap) pada Penyajian Laporan Keuangan BUM Desa*. 3, 157–172. <https://doi.org/10.20885/ncaf.vol3.art14>

Supra, D. (2019). *Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (Sak-Etap) Dalam Penyajian Laporan Keuangan*. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Rahmadiyah*, 2(2), 64. <https://doi.org/10.51877/jiar.v2i2.83>

UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Wahyuningtias, A., Yuliarti, N. C., & Martiana, N. (2021). *Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan Sak Etap Pada Bumdes Rejo Makmur Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi*. *Baswara: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 1(1), 52–61. <http://jurnalbaswara.com/index.php/baswara/articlesupr>

Wiyani, N. T., Akuntansi, A., & Insani, B. (2017). *Penerapan SAK ETAP Pada Penyusunan Laporan Keuangan*. *Wahana*, 20(1), 25–39.